

## Jokowi: Tidak Ada Rumusan yang Paling Benar Hadapi Pandemi

JAKARTA (IM) - Pandemi Covid-19 telah 11 bulan melanda Indonesia. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, banyak pelajaran yang diambil selama 11 bulan ini. Salah satunya, tidak ada rumusan yang paling benar dalam menghadapi pandemi. "Pengalaman 11 bulan ini mengajarkan bahwa kita dalam menghadapi pandemi tidak ada formula yang standar. Yang disebut rumusan formula yang benar juga tidak ada. Karena 215 negara mencari formula tepat untuk digunakan di negaranya masing-masing. Karena itu dibutuhkan manajemen untuk mengelola krisis secara cepat dan tepat," katanya dalam acara Soft Launching Golkar Institute, Selasa (2/2).

Jokowi mengatakan, bahwa saat ini pemerintah sedang mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengatasi pandemi. Salah satunya dengan melaksanakan vaksinasi secara cepat untuk memutus rantai penyebaran Covid.

"Kita juga sedang menyeimbangkan rem dan gas, mengendalikan penyebaran virus sekaligus melaksanakan berbagai program pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Selain itu, Mantan Wali Kota Surakarta ini juga menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi tantangan dan peluang pasca-pandemi Covid-19.

"Menyiapkan berbagai kebijakan dan program untuk menjawab peluang pasca-pandemi itu terjadi setelah keduanya mengikuti sebagai orang di dalam video yang beredar di media sosial pada November 2020 itu.

## Berkas Kasus Video Syur Gisel dan Nobu Dilimpahkan ke Jaksa

JAKARTA (IM) - Penyidik Polda Metro Jaya melimpahkan berkas perkara kasus dua tersangka video syur Gisel Anastasia dan Michael Yukinobu de Fretes kepada Kejaksaan, Selasa (2/2).

"Masalah GA dan MYD, rencananya hari ini (Selasa) kita laksanakan tahap 1 kepada JPU," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Selasa (2/2).

Menurut Yusri, penyidik nantinya akan menunggu keputusan Kejaksaan mengenai kelengkapan berkas perkara. "Kita menunggu saja apakah memang dianggap sudah lengkap atau belum P19. (kalau P19) tentunya kita lakukan semua, termasuk di dalamnya adalah olah TKP," kata Yusri.

Gisel dan Nobu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video konten pornografi pada 29 Desember 2020.

demi yang akan menjadi trigger untuk ekonomi bergerak lebih cepat," tandasnya.

Beri Wejangan ke Golkar Jokowi memberi sambutan di acara soft launching Golkar ra serius dan tidak boleh sambil lalu.

"Kaderisasi tidak bisa dikerjakan sambil lalu, harus digarap dengan matang, untuk menghasilkan dampak yang signifikan bagi kemajuan partai," katanya.

Bagi partai modern, kata dia, kehadiran sekolah kader sangat diperlukan karena kader dan kaderisasi, perlu dipersiapkan secara serius berjenjang dan berkelanjutan.

"Partai memerlukan lebih banyak lagi kader yang terdidik yang profesional yang kompeten, khususnya dalam bidang kepemimpinan politik dan ekonomi, yang dampaknya bukan hanya pada partai, tapi akan memberikan kontribusi yang penting bagi kemajuan bangsa," terangnya.

Kata politikus PDI Perjuangan ini, partai politik adalah sumber utama rekrutmen kepemimpinan nasional maupun daerah. Calon kepala daerah hingga Presiden sebagian besar berasal dari partai politik.

"Jika partai politik mampu mempersiapkan kadernya dengan baik, dan kualitas yang matang maka sudah dapat dipastikan kepemimpinan nasional maupun daerah juga akan berjalan dengan baik," ujarnya. ● han



## TINGKAT KEMISKINAN DI MASA PANDEMI COVID-19

Warga berjualan di depan rumahnya yang semi permanen di pinggir rel Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/2). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim kebijakan yang diambil pemerintah sudah cukup tepat dalam menekan angka kemiskinan di masa pandemi COVID-19 sehingga masih berada di level satu digit yakni 9,78 persen.

## Tak Ada Perbedaan Kualitas Vaksin Covid-19 Jadi dan Bentuk Curah

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, tidak ada perbedaan kualitas antara vaksin Covid-19 yang dikirim jadi dengan vaksin dalam bentuk curah atau bahan baku.

Nadia mengatakan, efikasi dari vaksin Covid-19 asal Sinovac sudah melalui tahap penilaian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, PT Bio Farma sudah mengantongi sertifikat terkait cara pembuatan obat yang baik (CPOB) untuk vaksin Covid-19.

"Tentunya sudah menjamin vaksin yang dihasilkan sama antara vaksin jadi dan vaksin setengah jadi yang diproses Bio Farma," ujar Nadia dalam diskusi bertajuk "Perkembangan Terkini

Vaksinasi Covid-19" secara virtual, Selasa (2/2).

Sebanyak 11 juta vaksin Covid-19 asal Sinovac tiba di Indonesia, Selasa (2/2). Jumlah itu terdiri dari 10 juta bahan baku vaksin dan 1 juta vaksin overfill atau vaksin setengah jadi. Bio Farma mulai memproduksi dosis vaksin tersebut pada 13 Februari 2021. Sebelumnya, sebanyak 15 juta dosis bahan baku vaksin Covid-19 Sinovac tiba di Indonesia pada 12 Januari 2021. Pengiriman pada 12 Januari merupakan tahap ketiga.

Sebelum itu, Indonesia telah menerima 3 juta dosis vaksin Sinovac. Tahap pertama diterima pemerintah Indonesia pada 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis vaksin siap pakai. Kemudian, pada 31 Desember pemerintah kembali menerima 1,8 juta vaksin. ● mci

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



## Pengurus dan Kader Demokrat Jabar 1.000% Solid Dukung AHY

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyu Wijaya mengingatkan semua pihak agar tidak coba-coba merusak soliditas yang telah terbangun di tubuh Partai Demokrat. "Jangankan melakukan, kata Asep, berpikir untuk kudeta pun harus dibuang jauh-jauh," katanya.

BANDUNG (IM) - DPD Partai Demokrat Jawa Barat menyatakan seluruh pengurus dan kader Partai Demokrat Jabar, solid mendukung kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pernyataan tersebut disampaikan DPD Partai Demokrat Jabar, menyusul isu kudeta terhadap Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.

"Terkait soal tingkat soliditas pengurus dan kader Partai Demokrat, saya pastikan 1000% sangat solid," kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar, Asep Wahyu Wijaya dalam keterangannya, Selasa (2/2).

Asep memastikan, kinerja seluruh pengurus dan kader DPD Partai Demokrat Jabar di bawah kepemimpinan AHY saat ini dalam kondisi optimal. "Kondisi pengurus dan kader di bawah pimpinan Ketum AHY ini sedang dalam kondisi high performance," ujarnya.

Menurut Asep, soliditas yang terbangun bukan semata-mata didasari oleh aura dan spint yang dipancarkan AHY, melainkan karena isu dan gagasan yang digaungkan AHY. Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat benar-benar sangat mengikat dan mengutamakan daya juang pengurus dan kader di tataran akar rumput (grass root).

"Jadi, ketika ada oknum-oknum dari internal atau eksternal Partai Demokrat yang mencoba untuk mengacaukan soliditas Partai Demokrat, saya pastikan bahwa mereka amat salah bacaannya.

## Penyalahgunaan Data Pribadi dengan Modus Aktivasi Kartu Perdana

BATAM (IM) - Polres Karimun mengungkap tindak pidana penyalahgunaan data kependudukan yang dilakukan salah satu distributor kartu telepon prabayar di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Pelaku berinisial Z alias Fi (26), diduga menyalahgunakan data kependudukan dengan cara mengaktifkan kartu perdana IM3 dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) secara ilegal.

Pelaku juga diketahui telah mengaktifkan sebanyak 4.000 kartu perdana IM3 dalam satu bulan, untuk memenuhi target agar mendapatkan bonus sebesar Rp 6,5 juta.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Karimun AKP Herie Pramono mengatakan, aksi Zu terungkap setelah adanya informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan kartu perdana IM3 yang telah aktif. Seharusnya, kartu perdana itu aktif setelah adanya pengaktifan menggunakan NIK KTP. Namun, kartu perdana IM3 itu dibeli sudah dalam keadaan terdaftar.

"Tersangka ditangkap di kediamannya di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun," kata Herie Pramono saat dihubungi, Selasa (2/2).

Saat pelaku ditangkap, polisi juga menyita 750.000 kartu perdana GSM IM3, 1 unit komputer, 2 modem aktifator dan pisau atau cutter untuk memotong kartu perdana.

"Pemeriksaan kita, modus ZU mengaktifkan kartu perdana itu dengan cara menggunakan modem aktifator yang dihubungkan melalui komputer, di mana dalam sekali aktivasi bisa langsung mengaktifkan 16 kartu per-

dana," kata Herie.

Kartu-kartu yang telah diaktifkan itu selanjutnya dijual kembali kepada masyarakat. "Zu telah mengantongi 250.000 NIK dari 750 barang bukti yang diamankan polisi. Satu NIK bisa mengaktifkan 3 GSM," kata Herie.

Herie mengatakan, saat ini Sateskrim Polres Karimun masih mengembangkan kasus tersebut untuk mencari tahu sumber Zu mendapatkan ribuan NIK, atau kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat. "Kami masih menelusurinya," kata Herie.

Atas tindakannya, Zu disangka melanggar Pasal 51 ayat 2 jo Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. ● han

## KONFERENSI PERS HASIL SURVEI PEMBERANTASAN KORUPSI

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (tengah) didampingi Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding (kiri) serta Pendiri dan Komisaris Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) Hendri Satrio (kanan) memberikan keterangan terkait laporan hasil survei "Kata Publik tentang Pemberantasan Korupsi" di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/2). Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKopi) itu menyebutkan diantaranya sebanyak 85,5 persen dari 2000 responden menilai penilaian kinerja KPK baik sedangkan 14,5 persen menilai belum baik.

## EVALUASI PPKM DI KOTA BANDUNG

Petugas gabungan menghentikan pengendara yang tidak menggunakan masker saat operasi penegakan disiplin COVID-19 di Tamansari, Bandung, Jawa Barat, Selasa (2/2). Pada Rapat Koordinasi Nasional Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan dan Penanganan COVID-19, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar setiap kepala daerah mendirikan posko pengawasan disiplin protokol kesehatan di sejumlah tempat keramaian guna menekan laju penyebaran COVID-19.

berharap bahwa hal ini tidak benar, AHY tidak akan tinggal diam dan akan mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat.

"Awalnya, kami tidak begitu saja percaya ketika para pelapor menyebut nama tokoh yang berencana untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat itu, mengingat posisi yang sedang dia emban saat ini dan faktor latar belakangnya. Tetapi, lebih dari 8 saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya," kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2).

## Apa Kata Senior Demokrat

Mantan Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat Ahmad Yahya mengatakan, pernyataan AHY yang melibatkan pihak eksternal partai adalah langkah tidak tepat.

"Untuk meluruskan pernyataan AHY yang melibatkan eksternal adalah tidak tepat, padahal ini urusan internal partai," kata Ahmad Yahya saat membacakan sikap pendiri dan senior Partai Demokrat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (2/2).

Ahmad Yahya menjelaskan

kan, harapan kader Demokrat secara khusus adalah tantangan meningkatnya ambang batas parlemen menjadi 7 persen namun faktanya perolehan suara partai tersebut dalam dua kali Pemilu terakhir terus menurun.

Dia juga menjelaskan terkait kedudukan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, itu bukan hal yang inkonstitusional namun telah diatur dalam AD/ART partai. Menurutnya, usulan KLB sepenuhnya adalah hak DPC dan DPD Partai Demokrat sebagai pemegang hak suara sedangkan DPP hanya memiliki satu hak suara. "Apabila dilarang atau jadi hal tabu (KLB) maka tentu yang melarang tidak memahami aturan dan asas demokrasi," ujarnya.

Dia menegaskan bahwa KLB adalah konstitusional karena sudah diatur AD/ART sebagai salah satu alternatif untuk menguji kemampuan atau kepiawaian seseorang dalam membesarkan partai. Menurut dia, dengan adanya aturan itu maka Ketua Umum harus hati-hati dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi usulan KLB.

Hadir dalam konferensi pers tersebut antara lain para mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat yaitu M. Darmizal, Yus Sudarso, Sofwatillah Muzaid, dan Tri Yulianto. ● han

## Nama Kader PDIP Ihsan Yunus Muncul Saat Rekonstruksi Kasus Bansos Covid-19

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron angkat bicara soal munculnya nama anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus, saat digelar rekonstruksi kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial Covid-19.

"Sekali lagi, rekonstruksi ini dilakukan masih dalam kerangka pengembangan kasus suapnya, apakah ini berhenti di suap? Semuanya tergantung pada hasil penyidikan," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/2).

Menurutnya, KPK tak menutup kemungkinan akan menjerat pihak lain yang diduga terlibat apabila didukung bukti yang cukup. Selain itu, apabila penyidik menemukan bukti yang memadai, KPK bakal mengembangkan kasus ini, misalnya dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Kalau penyidikannya kemudian menunjukkan ada keterlibatan-keterlibatan pihak-pihak lain dalam pengembangan kasus suap pengadaan bansos, memungkinkan kepada pihak tersebut (dijerat tersangka)," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan rekonstruksi kasus yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliarri Batubara itu di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (1/2). Terdapat setidaknya 10 tahap pemberian uang dengan jumlah bervariasi yang terungkap dalam rekonstruksi.

Misalnya, dalam adegan 4 pada Mei 2020 di ruangan Kasubdit Penanganan Korban Bencana Sosial Politik Kemensos sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bansos Matheus Joko Santoso di lantai 3 Gedung Kemensos, di mana terjadi pemberian tahap 1 senilai Rp 100 juta.

Pemberian itu berasal dari tersangka pemberi suap Harry Van Sidabukke selaku unsur swasta, yang juga diadiri Direktur Utama PT Hamonangan Mandala Sude Garuda Derana Niode dan Direktur Utama PT Agri Tekh Sejahtera Lucky Felian. Selanjutnya, adegan kelima pada Mei 2020, masih di ruangan Matheus Joko Santoso, terjadi pemberian tahap ketiga senilai Rp 100 juta yang juga menghadirkan Joko, Harry, Rangga, dan Lucky.

Kemudian, dalam rekonstruksi itu juga diketahui perantara anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ihsan Yunus yang bernama Agustri Yogaswara alias Yogas menerima uang Rp 1,532 miliar dan dua sepeda merek Brompton dari Harry. Total terdapat lima tersangka dalam kasus ini.

Selain Harry dan Joko, tersangka lainnya yakni, Juliarri Batubara, Adi Wahyono selaku (PPK) di Kementerian Sosial, serta Ardian I M selaku pihak swasta.

Dalam kasus ini, Juliarri Batubara diduga telah menerima uang sebesar Rp 17 miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya.

Uang tersebut diduga didapat dari fee setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp 10.000 per paket bansos senilai Rp 300.000. ● han

**PENGUMUMAN**  
PT Bangun Bantala Indonesia  
("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa PT Bakrie Building Industries sebuah perusahaan terbatas yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, telah mengkonversi penjaminannya kepada Perseroan menjadi modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. Demikian pengumuman ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 1999.

Jakarta, 3 Februari 2021  
Direksi  
PT Bangun Bantala Indonesia